

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)  
DI INDONESIA**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di  
BEI Tahun 2008-2011)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DWI ARINI UNTORO**  
NIM. C2C 009 265

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Dwi Arini Untoro

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009265

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **“PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TERHADAP LUAS *PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI INDONESIA”**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 11 Februari 2013

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

NIP. 19580525 1999103 2001

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Nama Penyusun : Dwi Arini Untoro

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009265

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **“PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TERHADAP LUAS *PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI INDONESIA”**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011)**

**Telah dinyatakan lulus pada tanggal 26 Februari 2013**

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. ( )
2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. ( )
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. ( )

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*“Setiap manusia pasti binasa kecuali orang yang berilmu, setiap yang berilmu juga binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, setiap pengamal ilmupun rusak binasa kecuali orang yang ikhlas niatnya ” (Al Hadits)*

*“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

*“The biggest mistakes of people life is make mistakes, but someone who never make any mistakes never do anything.”*

### **SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:**

*Allah SWT. Subhanallah.... Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, tidak ada Tuhan yang mampu memberikan kehidupan sempurna kecuali hanya Engkau.*

*Bapak dan Ibuk selaku motivator terbesar. Dengan apapun, kasih sayangmu tak akan pernah terbalaskan*

*Mas Yudha dan Dek Keri. Memiliki saudara seperti kalian adalah anugrah terindah yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dwi Arini Untoro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA” (Studi Empiris Pada Perusahaan perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

Dwi Arini Untoro

C2C009265

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik GCG yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011. Karakteristik GCG yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2011. Total sampel penelitian ini adalah 100 laporan tahunan perusahaan perbankan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis pengungkapan CSR pada laporan tahunan dengan metode *content analysis*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program *SPSS 16.00 for Windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perbankan di Indonesia, sedangkan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, *leverage*, dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

*Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governace (GCG), dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the characteristics of the GCG that affect CSR disclosure in annual reports of banking companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the year 2008-2011. GCG characteristics used in this study is the size of the board of commissioners, the proportion of independent of commissioners, and audit committee size.*

*The population of this study are all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2008-2011. Total sample is 100 annual report of banking companies as determined by purposive sampling method. This research analyzes CSR disclosure in annual reports by the method of content analysis. Data analysis was performed using multiple regression analysis with SPSS for Windows 16.00.*

*The results of this study indicate that the size of the board of directors and firm size (size) significantly affect CSR disclosure in Indonesia, and the proportion of independent board of directors, audit committee size, leverage, and profitability no proven effect against broad disclosure of CSR.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), board of commissioners, independent board of commissioners, and audit committee.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamiin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA”** (Studi Empiris Pada Perusahaan perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2011) ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan mencurahkan tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D., selaku dosen wali yang telah memberikan masukan, dukungan, dan saran bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
5. Bapak, ibuk, mas Yudha, dan dek Keri yang menjadi bagian dari kehidupan saya yang telah memberikan kehangatan dalam keluarga. Kalianlah satu-satunya alasan untuk terus bernafas.

6. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menjalani kuliah secara umum dan menyusun skripsi ini pada khususnya.
7. Semua guru, dosen, dan semua pendidik yang pernah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa dapat terus berkembang dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin...
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa dengan baik.
9. Sahabat saya, Tyas dan Hayu. Tak cukup berpuluh, beratus, beribu, bahkan berjuta kata untuk mengucapkan terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Terimakasih atas segalanya, yang telah kalian berikan, terimakasih telah menjadi tempat untuk berbagi cerita dalam suka maupun duka maupun tempat untuk saling bertukar pikiran. Lebih dari 2 tahun berada dibawah atap yang sama, semoga kebersamaan ini tak akan pernah lekang oleh waktu.
10. Sahabat saya, Azas Ramang Pambudi, yang telah bersedia menjadi pemberi semangat, teman bercerita, dan berbagi, juga sebagai teman yang selalu mengingatkan penulis setiap waktu
11. Sahabat saya, Akuntansi Reg-2 kelas A, khususnya: Tyas, Hayu, Adhi Karyo, Haris, Alen, Nanad, Edo, Sela, Ocir, Yasmin, Maydica, Handoko, Bang Riz, Breke, dan si *outlier*, Chandra, terimakasih telah menjadi teman sepermainan, teman bercerita, dan teman bergembira. *Without you, my life is so flat!*
12. Sahabat-sahabat saya, Akuntansi Reg-2 kelas A. Terimakasih atas kebersamaan yang indah selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro tercinta ini. Semoga kesuksesan senantiasa menjadi milik kita bersama!!
13. Sahabat seperbimbingan saya, Hemi. Terimakasih telah menjadi teman yang selama ini berjuang bersama untuk bimbingan. Terimakasih telah menjadi

teman berdiskusi dan bergalau-galau tentang skripsi kita. Sukses selalu ya Hem!!

14. Bapak dan ibu kos, pak Mari dan Bu Mari, terimakasih telah memberikan tempat tinggal selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
15. Mbak Rat dan Haryani, terimakasih telah masuk dan menjadi bagian dari keluarga penulis. Terimakasih telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dan keluarga penulis.
16. Seluruh sahabat dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kontribusi bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
17. Pendamping hidup, yang belum dipertemukan oleh-Nya, yang senantiasa menginspirasi untuk selalu berbuat baik dan yang terbaik.
18. Dan kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, terimakasih atas semua bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini maupun karya-karya selanjutnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Februari 2013

Penulis

Dwi Arini Untoro

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	<i>iii</i>
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	<i>iv</i>
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	<i>v</i>
ABSTRAK.....	<i>vi</i>
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR .....	<i>viii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xvi</i>
DAFTAR GAMBAR .....	<i>xvii</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xviii</i>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.3.2.2 Manfaat Praktis .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Agensi).....	14
2.1.2 Teori Legitimasi .....	18
2.2 <i>Corporate Social responsibility (CSR)</i> .....	21

2.2.1 Definisi dan Konsep CSR .....	21
2.2.2 CSR Di Indonesia.....	25
2.2.2.1 CSR Dalam PSAK No. 1 (Revisi 2008) .....	25
2.2.2.2 CSR Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	26
2.2.2.3 CSR Dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	28
2.3 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	30
2.3.1 Definisi Dan Konsep <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	30
2.3.2 Dewan Komisaris .....	35
2.3.3 Komisaris Independen.....	38
2.3.4 Komite Audit.....	40
2.4 Penelitian Terdahulu .....	42
2.5 Kerangka Pemikiran.....	50
2.6 Pengembangan Hipotesis .....	54
2.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	54
2.6.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	55
2.6.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	57
2.7 Hubungan Variabel Kontrol dan Variabel Dependen Dalam Penelitian .....	58
2.7.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan ( <i>Firm Size</i> ) Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	58
2.7.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Luas Pengungkapan CSR	59
2.7.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas	

Pengungkapan CSR .....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Variabel Penelitian.....	62
3.1.1 Variabel Terikat (Dependen) .....	62
3.1.2 Variabel Bebas (Independen).....	63
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris .....	63
3.1.2.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen .....	64
3.1.2.3 Ukuran Komite Audit .....	64
3.1.3 Variabel Kontrol .....	64
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan.....	64
3.1.3.2 Profitabilitas .....	65
3.1.3.3 <i>Leverage</i> .....	65
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	66
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	66
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	67
3.5 Metode Analisis Data.....	67
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	67
3.5.1.1 Uji Normalitas .....	67
3.5.1.2 Uji Multikolinieritas .....	68
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	69
3.5.1.4 Uji Autokorelasi .....	70
3.5.2 Analisis Regresi berganda.....	70
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	72
3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .....	72
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	73
3.5.3.3 Uji Parsial ( <i>t-test</i> ) .....	73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	75
4.2 Analisis Data.....	76
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	76
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	80
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	80
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas .....	80
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	82
4.2.2.4 Uji Autokorelasi .....	83
4.2.3 Analisis Regresi .....	84
4.2.4 Pengujian Hipotesis .....	85
4.2.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .....	85
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	85
4.2.4.5 Uji Parsial ( <i>t-test</i> ) .....	86
4.3 Interpretasi Hasil.....	86
4.3.1 Hipotesis Pertama (H1).....	87
4.3.2 Hipotesis Kedua (H2) .....	88
4.3.3 Hipotesis Ketiga (H3).....	89
4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan ( <i>firm size</i> ), <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Luas Pengungkapan CSR.....	90
4.3.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan ( <i>firm size</i> ) Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	91
4.3.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	92
4.3.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	93

BAB V PENUTUP .....	95
5.1 Simpulan .....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	97
5.3 Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel 4.1 Perusahaan Sampel .....	75
Tabel 4.2 Hasil Ananlisis Deskriptif .....	76
Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi Berganda .....	81
Tabel 4.4 Ringkasan hasil penelitian .....	94

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	22
Gambar 2.2 Struktur <i>One Tier System</i> .....	36
Gambar 2.3 Struktur <i>Two Tier System</i> .....	37
Gambar 2.4 Struktur <i>Two Tier System</i> yang diadopsi Indonesia .....	38
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	53
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	82
Gambar 4.2 <i>Scatter Plot</i> .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A .....	103
Lampiran B.....	107
Lampiran C.....	108
Lampiran D .....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang peneliti dalam menganalisis masalah terkait dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Selain itu, dalam bagian ini juga akan dijelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Selengkapannya, dapat dilihat dalam uraian berikut:

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

CSR merupakan isu yang hangat untuk dibicarakan. Sejak dahulu hingga sekarang isu ini terus berkembang. Istilah CSR muncul sejak sekitar 50 tahun lalu, dimana konsep awalnya diperkenalkan oleh Bowen (Solihin, 2009). Bowen (dalam Wartick dan Cochran, 1985 dikutip oleh Solihin 2009) berpendapat bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Pendapat Bowen tersebut memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Hingga saat ini CSR terus berkembang, dimana pada awalnya pengungkapan CSR merupakan sukarela sekarang menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini terlihat dengan adanya dukungan dari pemerintah berupa undang-undang untuk mengatur pelaksanaan dan pengungkapannya.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan interaksi antara

perusahaan dan masyarakat. Menurut Ginting (2007), CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap beberapa aspek perusahaan yaitu konsumen, karyawan, investor, komunitas lingkungan dan segala aspek operasional perusahaan.

Perusahaan memiliki alasan masing-masing mengapa mereka mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Secara umum, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial karena adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional mereka. Dengan adanya tanggung jawab dan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, diharapkan terjadi hubungan yang harmonis diantara keduanya. Selain itu, CSR perusahaan akan membentuk suatu citra yang baik bagi perusahaan. Menurut Nasir dan Warisi (2008), pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh kepercayaan para investor dan masyarakat. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan sentimen negatif yang akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat kegiatan operasional perusahaan. Tekanan-tekanan seperti inilah yang mengakibatkan perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya, sehingga perusahaan bertanggung jawab dan mengungkapkan

tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, tidak hanya sekedar kepada pemegang saham.

Di Indonesia, CSR sudah mulai banyak diterapkan pada perusahaan dan diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan peraturan mengenai pengungkapan atau *disclosure* itu sendiri diatur dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996. Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, karena keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari perolehan laba saja, tetapi juga ditentukan oleh keperdulian perusahaan terhadap masyarakat.

Bedasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, CSR berlaku untuk semua jenis perusahaan, terutama PT, dimana termasuk di dalamnya adalah perusahaan perbankan. Perbankan berdasarkan pada kegiatan operasionalnya memang tidak menimbulkan limbah atau dampak negatif kepada lingkungan. Namun demikian, perbankan dirasa tetap perlu untuk mengungkapkan CSR-nya karena keberadaannya di tengah masyarakat. Dalam menjaga eksistensinya, perbankan atau perusahaan secara umumnya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Djogo (2005), bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya diungkapkan oleh industri yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kepada masyarakat sekitar, namun juga bagi sektor perbankan selaku badan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Adanya undang-undang dan peraturan tentang CSR ternyata belum dapat mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Pada kenyataannya pengungkapan CSR masih dianggap sepele dan dijalankan dengan setengah hati (Daniri, 2008). Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Nasir dan Warisi (2008), bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan moral etika bisnis. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, dalam pengungkapan CSR ini diperlukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena implementasi dari tanggung jawab perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya (Nasir dan Warisi, 2008).

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekan kan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi, 2011).

Menurut Sulistyanto dan Lidyah (2002), dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan

konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah disebabkan oleh (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Dengan demikian, penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

Pelaksanaan GCG harus didukung oleh organ-organ perusahaan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia, secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Fungsi pengawasan ini diperkuat dengan adanya dewan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris, karena dewan komisaris independen berasal dari pihak yang tidak terafiliasi sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan. Adanya pengawasan ini dapat menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*investor*) dan semua informasi yang

dimiliki perusahaan akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga informasi tentang pengungkapan CSR.

Pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite. Salah satunya adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan. Menurut Alijoyo (2003), komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; menciptakan disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan dan pengungkapan.

Penelitian yang terkait dengan GCG dan pengungkapan CSR oleh perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG dan pengungkapan CSR merupakan hal yang penting dan membutuhkan perhatian besar. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Haniffa dan Cooke, 2005; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006; Darwis, 2009; Handajani dkk., 2009; Waryanto, 2010, dan Badjuri, 2011. Secara umum, objek penelitian dalam penelitian tersebut merupakan perusahaan non keuangan. Sebaliknya, penelitian yang difokuskan dalam perusahaan keuangan masih sangat sedikit (Branco dan Rodrigues, 2006; Zappi, 2007; Khan, 2010). Studi yang dilaksanakan oleh Branco (2006) menunjukkan bahwa pelaporan CSR pada sektor perbankan merupakan salah satu alat yang penting untuk berkomunikasi dengan

para *stakeholder*-nya. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Zappi (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR oleh perbankan adalah sebagai manajemen strategi perusahaan yang berorientasi pada pemberian nilai bagi para *stakeholder*-nya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ketidak konsistenan penelitian terdahulu ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Sulistyarini (2007) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif terhadap pengungkapan CSR. Penemuan ini berbeda dengan penemuan Said, *et al.* (2009) yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara dewan komisaris terhadap luas pengungkapan CSR

Penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2009) menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, namun penelitian Khan (2010) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Handajani, dkk. (2009) menemukan bahwa komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) menemukan hasil yang berbeda yaitu komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2003) beragamnya hasil tersebut sebagian disebabkan

karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang tidak konsisten.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh faktor GCG terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), laba perusahaan (*profitabilitas*), dan *leverage*. Berbagai karakteristik tersebut sudah digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu, sehingga dijadikan pertimbangan. Penelitian ini secara umum memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan tersebut terdapat dalam aspek:

1. Penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan yang diambil dari penelitian Khan (2010) dengan penyesuaian yang diharapkan dapat memenuhi aspek-aspek dalam pengungkapan CSR di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011 sebagai populasi penelitian. Data ini merupakan data terbaru, yang mana penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perbankan masih sangat jarang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti tentang pengaruh karakteristik GCG terhadap luas pengungkapan CSR. Oleh

karena banyaknya penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh karakteristik GCG terhadap CSR, maka peneliti mengambil objek penelitian yang lebih spesifik yaitu pada bidang perbankan dengan mengambil judul :

**“PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA” (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2011)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

CSR merupakan isu yang masih marak dibicarakan sampai pada tahun 2010-an sekarang ini, bahkan isu ini semakin berkembang. Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan adanya undang-undang, yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, dengan adanya undang-undang tersebut masih banyak perusahaan yang belum mau mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Oleh sebab itu dalam pengungkapan CSR diperlukan prinsip-prinsip GCG. Disisi lain, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pedoman-pedoman pengungkapan, sehingga terdapat variabilitas pengungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Perbedaan ini dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satu faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah adanya GCG. Dengan demikian, selain berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, GCG juga berpengaruh terhadap variabilitas pengungkapan CSR itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR perusahaan, namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian Handajani, dkk. (2009) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, namun penelitian Khan (2010) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Perbedaan hasil penelitian yang lain adalah hasil penelitian Handajani, dkk (2009) dan penelitian Waryanto (2010). Handajani, dkk. (2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan, namun penelitian Waryanto (2010) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan adanya hasil penelitian yang berbeda di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap pelaporan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada perusahaan perbankan di Indonesia?”, yang kemudian karakteristik-karakteristik *Good Corporate Governance* ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pelaporan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pelaporan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap luas pelaporan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selengkapnya, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
2. Menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
3. Menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik-karakteristik apa saja yang dapat mempengaruhi pelaporan CSR

pada sektor perbankan sehingga dengan adanya pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan secara tepat.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen perbankan pada khususnya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam hal pelaporan CSR di dalam pelaporan tahunan perusahaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun secara berurutan dan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Sistematika penulisan dan deskripsi masing-masing bab adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**, berisi tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian.

**Bab III : Metode Penelitian**, berisi uraian mengenai variable-variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis penelitian.

**Bab IV : Pembahasan,** berisi pembahasan dari hasil penelitian yang berisi deskripsi obyek penelitian, analisis, dan data pembahasan.

**Bab V : Simpulan Dan Saran,** berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu dalam telaah pustaka juga akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan juga hasil-hasilnya. Secara sistematis, bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) perspektif hubungan keagenan tidak dapat dipisahkan. Hubungan keagenan merupakan keadaan antara dua belah pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain menjadi principal (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hubungan keagenan muncul karena adanya pihak (*principal*) yang mempekerjakan pihak lain (agen) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Teori keagenan merupakan teori yang membahas mengenai pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen. Agen yang dimaksud pada konteks ini merupakan pihak yang mendapatkan limpahan wewenang untuk mengelola perusahaan, sedangkan prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang. Pada perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, banyak sekali

perusahaan yang memisahkan antara pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Perusahaan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang perusahaan kepada pihak yang dianggap lebih profesional dan lebih ahli dalam mengelola perusahaan. Menurut Sutedi (2011), salah satu tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan ini adalah untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para tenaga profesional ini bertugas untuk mengelola perusahaan, melaksanakan segala hal untuk kepentingan perusahaan dan juga memiliki keleluasaan untuk menjalankan manajemen perusahaan, sehingga para profesional ini disebut dengan agen dari pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Dalam teori keagenan, kebutuhan perusahaan yang berskala besar, ketrampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (*shareholder*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*). Pada skala perusahaan seperti ini di mana kepemilikannya tersebar serta dimungkinkan penggunaan sumberdana lain berupa pinjaman menyebabkan analisis harus dilakukan dengan teori agensi.

Asumsi yang dipergunakan dalam teori ini adalah sebagai berikut (Sutedi, 2011):

1. Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, oleh karena itu agen yang mendapatkan kewenangan dari principal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri.
2. Individu mempunyai pemikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dari masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan.

Bedasarkan asumsi yang dikemukakan, teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya konflik kepentingan antara agen dan principal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), bahwasannya konflik kepentingan disebabkan oleh adanya kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga memunculkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Ibrahim (2007), konflik kepentingan ini ada karena adanya perbedaan tujuan diantara berbagai pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya dalam perusahaan.

Teori keagenan selain menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan juga menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang lebih banyak mengetahui informasi internal. Sebagai pengelola, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang

disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini lah yang disebut dengan asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Asimetri informasi ini memberikan kesempatan kepada agen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi ini menimbulkan biaya keagenan yang harus ditanggung perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

1. Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agen.
2. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena resiko meruginya tinggi.
3. Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan monitoring kinerja dan perilaku agen oleh principal (*monitoring cost*).
4. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan agen oleh principal (*bonding cost*).

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat merugikan perusahaan, oleh sebab itu maka perlu diadakan tindakan untuk menguranginya. Menurut Ibrahim (2007), tindakan yang tepat untuk mengurangi adalah dengan adanya pengawasan yang dapat menyelaraskan seluruh tindakan yang ada dalam perusahaan. Pengawasan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Penerapan GCG diharapkan memberikan kepercayaan kepada

manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan manajemen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan biaya keagenan.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi pada dasarnya menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Brown dan Deegan, 1998 dalam Michelin dan Parbonetti, 2010). Selanjutnya Ulman (1982) dalam Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan berada di tengah-tengah masyarakat dan atas keberadaannya tersebut maka perusahaan harus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut berada, sehingga terjadi hubungan yang harmonis diantara keduanya.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dalam keberadaannya harus memiliki nilai-nilai sosial yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya. Ketika nilai-nilai yang dianut tidak sesuai, maka keberadaan legitimasi dari perusahaan ini akan terancam dan akan muncul *legitimacy gap* yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan (Ulman, 1982 dalam Ghazali dan Chariri, 2007). Menurut Warticl dan Mahon (1994), *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu :

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Dalam keberadaannya, *legitimacy gap* tidak mudah untuk ditentukan namun yang penting adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya *gap* tersebut. Menurut Neu, *et al.* (1998), untuk mengurangi *legitimacy gap* perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki *power* sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan. Hal ini senada dengan saran dari O'Donovan (2001) yang mengatakan bahwa ketika terdapat perbedaan diantara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial yang ada atau persepsi terhadap perusahaan sebagai taktik legitimasi.

Legitimasi dalam dunia bisnis dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling umum yang digunakan dalam dunia bisnis adalah dengan mengungkapkan pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Pengungkapan CSR ini diharapkan dapat membuat perusahaan memperoleh legitimasi sosial sehingga dapat memaksimalkan kekuatan keuangan dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selain

itu pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990; dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Disamping hal tersebut di atas, pengungkapan CSR juga merupakan mekanisme untuk menunjukkan kinerja perusahaan terhadap para investor dan kepada masyarakat. Dengan diungkapkannya CSR ini menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja baik, sehingga perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik dari masyarakat dan investor serta perusahaan akan memiliki daya tarik dalam hal penanaman modal.

Hal penting lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah bahwa pelaporan CSR akan dapat mengurangi adanya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ghazali dan Chariri (2007) bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan CSR merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun yang buruk.

## **2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **2.2.1 Definisi dan Konsep CSR**

Konsep CSR mulai diperkenalkan oleh Bowen pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab sosial pengusaha. Menurut Bowen (1999) dalam Ginting (2007), tanggung jawab sosial diartikan sebagai,

*“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”*

*“Corporate Social Responsibility (CSR) is concept which encourages organizations to consider the interest of society by taking responsibility for the impact of the organization’s activities on customers, employees, shareholders, communities, and the environments in all aspects of its operations. This obligations is seen to extend beyond the statutory obligation to comply with legislation and sees organizations voluntary taking further steps to improve the quality of life for employees and their families as well as for the local community and society at large.”*

Pengertian lain menurut *World Business Council for Sustainable Development States (WBCSD)*, CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjajanya beserta seluruh keluarganya.

*“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”*

Menurut Hunger dan Wheelen (1996), jika dilihat dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab

sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi bagiannya. Sejarah bisnis dan masyarakat secara jelas menunjukkan bahwa etika bisnis mengabaikan tanggung jawabnya terhadap *stakeholder*, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Organisasi bisnis harus mengenali semua tanggung jawab sosial mereka jika ingin mempunyai otonomi yang sangat penting pengaruhnya bagi efektifitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya menurut A.B Carroll (dalam Hunger dan Wheelen, 1996) perusahaan memiliki empat tanggung jawab, yaitu dalam aspek ekonomi, hukum, etika, dan kebebasan memilih (*discretionary*) dan dapat digambarkan sebagai berikut:

### Gambar 2.1

#### Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial			
Ekonomi (harus dilakukan)	Hukum (harus dilakukan)	Etika (sebaiknya dilakukan)	Pilihan bebas (mungkin dilakukan)

Sumber : Hunger dan Wheelen (1996)

Tanggung jawab ekonomi manajemen organisasi bisnis adalah memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar kembali para kreditor dan pemegang saham. Tanggung jawab hukum ditentukan oleh pemerintah dimana manajemen diharapkan taat kepada hukum. Namun tanggung jawab ekonomi dan hukum bukanlah tanggung jawab sosial, melainkan suatu yang harus dilakukan agar

perusahaan tetap bertahan dalam bisnis. Tanggung jawab sosial memasukkan baik tanggung jawab etika maupun tanggung jawab kebebasan memilih. Tanggung jawab etika dari suatu manajemen organisasi adalah mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana perusahaan harus bertindak dalam suatu masyarakat. Sedangkan tanggung jawab kebebasan memilih adalah kewajiban yang diasumsikan murni bersifat sukarela. Perbedaannya adalah beberapa orang berharap organisasi memenuhi tanggung jawab kebebasan memilih, sedangkan banyak orang berharap organisasi memenuhi etika.

Empat tanggung jawab tersebut dituliskan berdasarkan tingkat pentingnya. Perusahaan bisnis, pertama-tama harus membuat keuntungan untuk memuaskan tanggung jawab ekonominya. Agar terus dapat bertahan, perusahaan harus memenuhi hukum, dengan demikian ia memenuhi tanggung jawab hukumnya. Setelah tanggung jawab dasar dapat terpenuhi, perusahaan harus berusaha memenuhi tanggung jawab sosialnya, baru kemudian memenuhi tanggung jawab etika dan tanggung jawab kebebasan memilih.

Menurut Hunger dan Wheelen (1996), ada empat alasan terkait perilaku manajemen perusahaan bisnis yang menyebabkan mengapa perusahaan bertanggung jawab secara sosial:

1. Moralitas

Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak karena hal ini merupakan hal yang benar yang harus dilakukan, terutama berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau beberapa tanda moral yang diyakini secara

personal, suatu tindakan dinilai berdasarkan apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Pemikiran tersebut bersifat *altruistic* (hanya memikirkan kepentingan orang lain), tidak ada harapan untuk mendapatkan balas jasa dari apa yang kita lakukan.

## 2. Pemurnian kepentingan diri sendiri

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Terkadang dicerminkan dalam istilah “apa yang ditabur, itulah yang akan dituai”, alasan ini menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan besar akan dihargai karena tindakan-tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun hal ini tidak terkait dengan keuntungan secara langsung, namun kenyataan menunjukkan adanya keuntungan yang timbul diakibatkan adanya tanggung jawab sosial.

## 3. Teori investasi

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* karena tindakan itu akan dicerminkan dalam tingkat laba yang lebih tinggi dan dalam harga persediaan perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, hasil penelitian yang terkait bersifat bias karena melibatkan perusahaan dengan profitabel tinggi maupun profitabel marjinal dengan catatan sosial yang buruk maupun yang sangat baik.

## 4. Mempertahankan otonomi

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajerial.

Alasan-alasan inilah yang selanjutnya melatar belakangi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat memilih berbagai program dalam CSR-nya.

### **2.2.2 CSR di Indonesia**

Penerapan CSR di Indonesia pada saat ini memang sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Namun, selain hal tersebut, adanya persaingan yang semakin ketat dan desakan globalisasi semakin menuntut perusahaan untuk menjalankan CSR-nya. Keharusan pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998), Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **2.2.2.1 CSR dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998)**

Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ditungkan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) pada paragraf kesembilan, yang isinya adalah:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

#### **2.2.2.2 CSR dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terdapat pada BAB V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu pada pasal 74. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 undang-undang ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Ginting (2007),

tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, latar belakang dimasukkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh tetapi memiliki batasan-batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam. Tanggung jawab sosial ini harusnya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif tetapi juga sektor keuangan atau finansial seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif atau yang peduli terhadap lingkungan.

### **2.2.2.3 CSR dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terdapat pada bab IX mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal yaitu pada Pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengungkapkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam penanaman modal baik itu modal dalam negeri ataupun asing harus mengungkapkan tanggung jawab sosial dan harus menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). Hal ini juga menegaskan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial (CSR) dan tata kelola perusahaan (GCG) adalah sangat erat. Menurut Ginting (2007), prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu

*responsibility* (tanggung jawab moral) tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum) dan dengan demikian apabila hal ini tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap sanksi hukum, yang diatur dalam pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksana investasi tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip GCG. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanam modal melaksanakan prinsip CSR, dengan demikian apabila prinsip GCG dilaksanakan dengan baik maka CSR juga dapat berjalan dengan baik dan

tidak mungkin disimpangi oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang telah terbiasa dengan prinsip CSR ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi atau berkongsi melakukan investasi pasti memilih perusahaan yang melakukan prinsip CSR dengan benar (Ginting, 2007).

### **2.3 Good Corporate Governance (GCG)**

#### **2.3.1 Definisi dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governace* (GCG) secara umum diketahui sebagai tata kelola atau tata pamong perusahaan. Istilah GCG ini pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* pada tahun 1992. Dalam laporan mereka yang dikenal dengan *Cadbury Report*, laporan ini dianggap sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktek *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut *Cadbury Report*, pengertian *corporatae governance* adalah:

“Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.” Definisi lain dari *Cadbury Report* memandang *corporate governance* sebagai manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Menurut *Center of European Policy Study* (CEPS) dalam Sutedi (2011), GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan bukan hanya satu *stakeholder* saja. Pengertian GCG yang lain diungkapkan oleh Neonsi, seorang GCG dari *Indo Consult* (dalam Sutedi, 2011) bahwa

pengertian GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam Tjager, *et al.* (2003) yang dikutip oleh Nasir dan Warisi (2008)), pengertian GCG adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan pengertian lain diungkapkan oleh Gede Raka dalam sebuah seminar (2001) dan dikutip oleh Nasir dan Warisi (2008) GCG adalah upaya untuk menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan sosial, dan diantara tujuan-tujuan individu dan tujuan-tujuan masyarakat. Sasarannya adalah untuk menyelaraskan sejauh mungkin kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa CGC pada dasarnya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menghindari benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi, serta untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, GCG dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan sehingga proses pelaksanaan kinerja yang ada dalam perusahaan dapat berjalan efektif dan terjadi keseimbangan kepentingan diantara pihak-pihak yang

saling terkait di dalamnya, tidak terkecuali hubungan dengan publik atau masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, perbankan merupakan salah satu instansi yang erat sekali berhubungan dengan masyarakat. Karena fungsi dari perbankan adalah menjembatani hubungan antara pihak (masyarakat) yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Oleh sebab itu, perbankan harus memiliki sistem kerja yang menganut prinsip-prinsip GCG sehingga tercipta rasa percaya oleh masyarakat terhadap mekanisme pasar sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, perbankan juga merupakan perusahaan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal *corporate governance* karena perusahaan perbankan sangat berbeda dari perusahaan lain dalam hal klaim aset dan dana bank (Amin and Tareq, 2006; Jensen and Meckling, 1976; Chaudury, 2004 dalam Khan 2010)

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia menyebutkan bahwa sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas

kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Keterbukaan (*Transparency*)**

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance sistem* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment sistem*.

## 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

#### **4. Independensi (*Independency*)**

- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5. Kewajaran (*Fairness*)**

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **2.3.2 Dewan Komisaris**

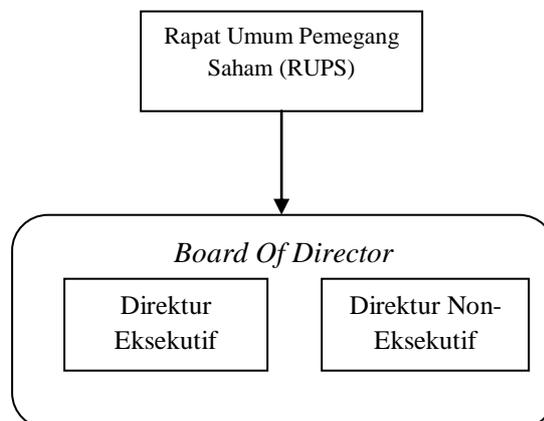
Forum *Corporate Governance Indonesia* (2002) mengemukakan bahwa ada dua sistem manajemen yang berbeda yang mengakibatkan berbedanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah pada tingkat pengawasan, yaitu satu tingkat pengawasan (*one tier sistem*) dan dua tingkat (*two tier sistem*).

### 1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier Sistem*)

Sistem ini menggunakan satu sistem pengawasan. Biasanya perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non-Direktur Eksekutif). Sistem satu tingkat ini berasal dari sistem hukum Anglo Saxon dan negara yang menerapkan sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat dan Inggris. Struktur *One Tier Sistem* dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Struktur *One Tier Sistem***



*Sumber : FCGI (2002)*

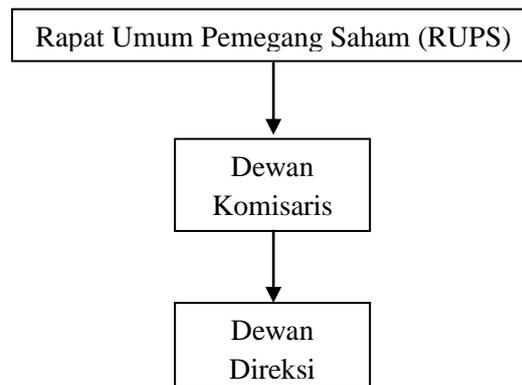
### 2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier Sistem*)

Sistem ini menggunakan dua sistem pengawasan yang terpisah. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi, yang mana dewan direksi ini bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan.

Sistem dua tingkat ini berasal dari sistem hukum Kontinental Eropa dan negara yang menerapkan antara lain adalah Denmark, Jepang, Jerman, Belanda, dan Indonesia dengan beberapa penyesuaian (FCGI, 2002)

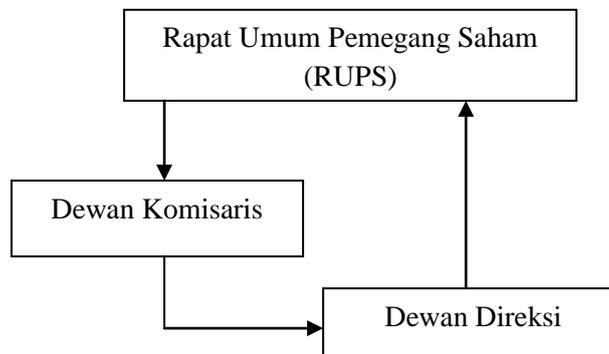
**Gambar 2.3**

**Struktur *Two Tier Sistem***



*Sumber : FCGI (2002)*

Di Indonesia *two tier sistem* diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Dewan komisaris tidak secara langsung membawahi dewan direksi, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada dewan direksi (KNKG, 2006). Dewan komisaris di Indonesia tidak berhak mengangkat dan memberhentikan direksi, karena posisi yang sejajar di antara keduanya, tidak seperti *Continental Europe*. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris hanya berhak memberhentikan anggota direksi secara sementara, bukan bersifat tetap.

**Gambar 2.4****Struktur *Two Tier Sistem* yang diadopsi oleh Indonesia**

*Sumber : FCGI (2002)*

Posisi dewan komisaris merupakan posisi yang sangat penting pada perusahaan. Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan. Berdasarkan tugasnya tersebut maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

### **2.3.3 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi. Komisaris independen bersifat independen yang tidak mempunyai hubungan dengan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali dan juga bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhinya untuk bertindak independen. Peraturan Bapepam IX.I.5 juga mendefinisikan bahwa yang

dimaksud dengan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa dalam perusahaan harus memiliki komisaris independen, antara lain disebutkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pedoman GCG perbankan di Indonesia. Literatur ini menyebutkan bahwa dalam perseroan terbatas (terdapat pada pasal 108 ayat 5) wajib memiliki dewan komisaris paling sedikit adalah 2 (dua) anggota dewan dan jumlah komisaris independen adalah minimal 30% dari total komisaris. Sedangkan untuk perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan perbankan, hal ini untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah komisaris independen adalah paling sedikit 50% dari total komisaris yang ada. Ketentuan tentang kewajiban adanya komisaris independen minimal 50% dari total komisaris ini tidak melihat apakah bank yang bersangkutan telah *go public* atau belum.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), saat ini keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran

dewan komisaris suatu perseroan. fungsi organ dewan komisaris adalah pengawasan, yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan. Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Hal ini senada dengan pendapat Khan (2010) bahwa komisaris independen dipandang sebagai mekanisme *check and balance* tidak hanya dalam memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya.

#### **2.3.4 Komite Audit**

Dewan komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh beberapa pihak. Salah satu pihak yang bertugas membantu dewan komisaris adalah komite audit. Tidak adanya Komite Audit di perusahaan mengakibatkan beban/tugas komisaris menjadi lebih berat, karena tidak ada pihak independen & ahli dibidangnya yang membantu tugasnya dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan. Keberadaan Komite Audit di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN).

Komite audit merupakan badan yang kedudukannya berada di bawah dewan komisaris dan bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris

dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Terkait dengan tugas-tugas komite audit, secara umum komite audit memiliki tanggung pada tiga bidang jawab sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Kontrol*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Menurut Surat edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan,
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Berdasarkan fungsi dan tugasnya, komite audit dituntut untuk berasal dari pihak-pihak yang independen dan mandiri yang tidak terkait dengan tugas manajemen sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam penyusunan laporan dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan oleh komite audit. Pihak yang independen ini diharapkan bisa lebih adil dan tidak memihak dalam menangani permasalahan yang ada.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah banyak dilakukan. Penelitian ini telah dilaksanakan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hasil penelitiannya pun bervariasi. Penelitian mengenai CSR dan GCG ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama, namun demikian belakangan menjadi semakin ramai untuk diteliti karena adanya perubahan regulasi yang mengaturnya.

Anggraini (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEI) pada tahun 2000-2004. Dalam penelitian ini Anggraini menggunakan variabel independen kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan dan tipe industri, dan *profitabilitas* sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan informasi sosial. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian oleh Anggraini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sosial sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sosial.

Tahun 2009, Handayani dkk., melakukan penelitian yang berjudul “*The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism on Corporate Social Responsibility disclosure : An Empirical Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange*”. Sampel penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2007. Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, komposisi direktur independen dalam jajaran dewan, kepemilikan institusional, dan komite audit. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, tipe industri, dan *leverage*, sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan CSR. Metode penelitian yang dipergunakan Handayani dkk. adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

manajemen laba, komite audit, ukuran perusahaan, dan tipe industri berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel komposisi direktur independen dalam jajaran dewan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pada tahun yang sama, Darwis (2009) juga melakukan penelitian yang hampir serupa dengan Handajani dkk. Hanya saja, penelitian Darwis tersebut terbatas pada pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh Darwis ini berjudul “Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Financial Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *High Profile* di BEI”. Sesuai dengan judulnya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Sampel penelitian yang dipergunakan oleh Darwis merupakan perusahaan *high profile* yang terdaftar di BEI pada tahun 2005. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) adalah mengenai pengaruh karakteristik-karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada sektor perbankan di Bangladesh. Penelitian yang dilakukan oleh Khan ini dilakukan pada 30 bank yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh dan menggunakan variabel independen

dewan komisaris, keberadaan perempuan dalam dewan, dan keberadaan dewan asing. Selain itu Khan juga menggunakan variabel kontrol berupa rasio keuangan yaitu *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang dipergunakan adalah luas pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan keberadaan dewan asing berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR dan keberadaan perempuan dalam dewan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Waryanto (2010) juga melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian di atas. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan CSR. Waryanto dalam penelitiannya menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR dan variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, jumlah pertemuan dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi. Selain variabel dependen tersebut, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu *firm size*, dan *leverage*. Hasil penelitian dengan metode regresi berganda ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi, *firm size*, dan *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian-penelitian di atas adalah penelitian Bajuri (2011). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh faktor-faktor fundamental dan karakteristik GCG terhadap pengungkapan CSR pada

perusahaan manufaktur dan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian Bajuri ini menggunakan variabel independen *likuiditas*, *profitabilitas*, *firm size*, *leverage*, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Variabel independen yang digunakan adalah pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profitabilitas*, dewan komisaris independen, dan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan *leverage*, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Penulis (Tahun)</b>	<b>Jml. Sampel</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Variable Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sembiring (2005)	78 Perusahaan Yang Tercatat Di BEJ Pada Tahun 2002	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Size, Profitabilitas, Profil Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, <i>Leverage</i>	Size, Profil Perusahaan, Dan Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Haniffa And Cooke (2005)	160 Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di JKSE Tahun 1996 Dan 2002	Pelaporan Sosial Perusahaan	<b>Independen:</b> Proporsi Direksi Melayu, Direktur Keuangan Melayu, Prop. Pemegang Saham Melayu, Prop. Dewan	Prop. Direksi Melayu, Prop. Pemegang Saham Melayu, Dewan Komisaris Independen, Direktur Berganda, Ukuran,

			Komisaris Independen, Perusahaan Dengan Beberapa Direktur, Pemegang Saham Asing, <b>Kontrol:</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Status Ganda, Jenis Industri.	Profitabilitas, Dan Jenis Perusahaan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pelaporan Sosial Perusahaan.
Anggraini (2006)	1188 Perusahaan <i>Go Public</i> Tahun 2000-2004	Pengungkapan Informasi Sosial	Kepemilikan Manajemen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas.	Kepemilikan Manajemen, Dan Tipe Industri Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial.
Handajani Dkk. (2009)	67 Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<b>Independen:</b> Manajemen Laba, Komposisi Direktur Independen Dalam Jajaran Dewan, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit. <b>Kontrol:</b> Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, <i>Leverage</i>	Manajemen Laba, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Tipe Industri Berpengaruh Terhadap CSR <i>Disclosure</i> .
Darwis (2009)	Perusahaan <i>High Profile</i> Yang Terdaftar Di BEI Pada	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan

	Tahun 2005			Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Khan (2010)	30 Perusahaan Perbankan Terdaftar Di Dhaka Stock Exchange Tahun 2007-2008	Luas Pengungkapan CSR	<b>Independen:</b> Proporsi Dewan Komisaris independen, Proporsi Dewan Direksi Perempuan, Proporsi Dewan Direksi Asing <b>Kontrol:</b> <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan	Keberadaan Proporsi Dewan Direksi Asing Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan CSR.
Waryanto (2010)	116 Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008	Luas Pengungkapan CSR	<b>Independen :</b> Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Prop. Dekom Independen, Ukuran Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Terkonsentrasi. <b>Kontrol :</b> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>	Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan CSR
Badjuri (2011)	77 Perusahaan	Pengungkapan CSR	Likuiditas, Profitabilitas,	Profitabilitas, Komisaris

	Manufaktur Dan SDA Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009		Firm Size, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Saham Public, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit.	Independen, Dan <i>Firm Size</i> Berepengaruh Terhadap Pengungkapan CSR
--	--	--	--	--

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Secara umum, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010), namun dilaksanakan dengan beberapa perubahan, yaitu dengan mengganti variabel proporsi dewan direksi perempuan dan proporsi dewan direksi asing dengan ukuran komisaris (Sembiring, 2005) dan ukuran komite audit (Handajani. dkk, 2009). Perubahan beberapa variabel ini berdasarkan adanya hasil penelitian oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2002, bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia termasuk Indonesia adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit dalam suatu perusahaan tidak berfungsi secara efektif. Hasil penelitian ini menarik untuk diteliti kembali dalam memastikan apakah mekanisme pengawasan telah berjalan dengan efektif terhadap luas pengungkapan informasi pada perusahaan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang luas pengungkapan CSR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang lainnya adalah penelitian ini menggunakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan (perbankan) sebagai objek penelitian karena kebanyakan penelitian terdahulu

menggunakan perusahaan non keuangan sebagai objek penelitian, sehingga perlu diteliti tentang luas pengungkapan CSR oleh perusahaan keuangan (perbankan).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang digunakan dalam penelitian. Dalam bagian kerangka penelitian ini dijelaskan tentang alur logika dan hubungan yang menunjukkan kaitan antar variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud adalah :

- a. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- b. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG)

Selanjutnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel GCG yaitu:

- a. Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi.
- b. Komisaris independen merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan dengan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali dan juga bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhinya untuk bertindak independen.
- c. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Selain variabel-variabel tersebut, di dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah :

- a. Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dinilai dengan total asset yang dimiliki perusahaan.
- b. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.
- c. *Leverage* keuangan (*ratio leverage*) adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membelanjai/membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan (dari kreditur-kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara karakteristik-karakteristik *Good Corporate Governace* dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial, maka peneliti mengindikasikan bahwa karakteristik-karakteristik *Good Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit, serta *firm size*, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variable kontrol.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Handajani (2009) dan Khan (2010). Penelitian ini memprediksikan bahwa seluruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki

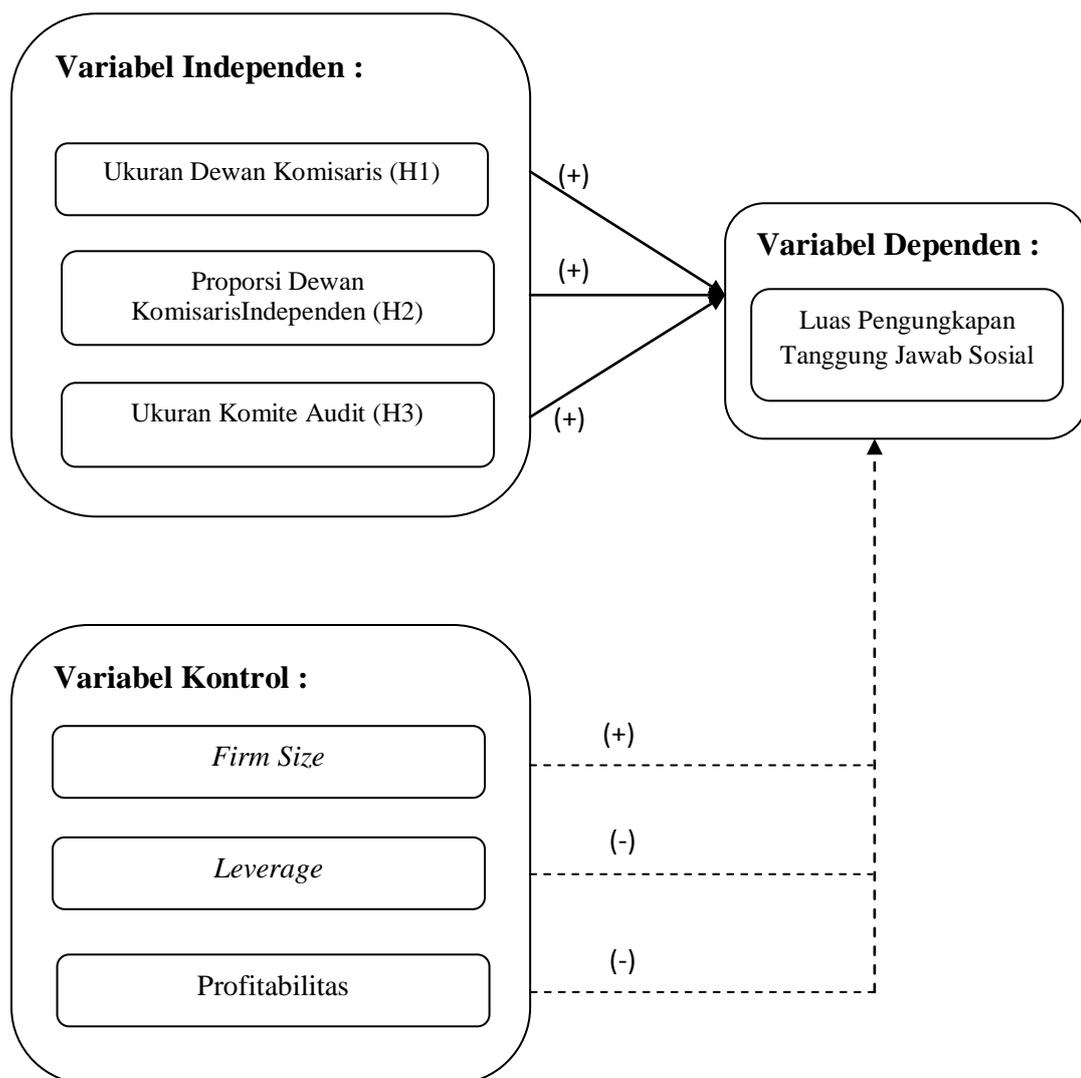
hubungan yang positif dengan luas pengungkapan CSR. Hubungan positif ini disebabkan oleh karena dengan adanya ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit yang semakin besar maka akan memudahkan dalam mengontrol kinerja perusahaan. Dengan adanya komite audit, maka pekerjaan dewan komisaris dan dewan komisaris independen akan sangat terbantu sehingga akan semakin meningkatkan kontrol.

Variabel kontrol yaitu *firm size*, *profitabilitas*, dan *leverage* diprediksikan memiliki pengaruh atau hubungan yang berbeda terhadap luas pengungkapan CSR, dimana *firm size* akan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dan profitabilitas serta *leverage* akan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR. *Firm size* berpengaruh positif karena dengan adanya *firm size* yang besar maka secara umum perusahaan akan mengungkapkan CSR-nya. Selain itu bahwa perusahaan untuk mendapatkan legitimasi maka perusahaan perusahaan harus melakukan aktivitas sosial agar mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Sementara itu, profitabilitas dan *leverage* mempunyai hubungan yang negatif karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi dirasa tidak perlu untuk melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dirasa perlu untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya ketika sedang dalam keadaan profit yang kecil untuk menunjukkan citra yang tetap baik. Sedangkan perusahaan dengan rasio *leverage* yang besar cenderung akan melaporkan tanggung jawab sosialnya semakin besar, namun demikian rasio *leverage* yang besar juga akan mengakibatkan perusahaan

mengurangi biaya-biaya yang salah satunya biaya untuk pelaporan tanggung jawab sosial demi untuk menunjukkan keuntungan yang besar dan demi pencitraan, oleh karena itu hubungan antara keduanya menjadi hubungan negatif.

**Gambar 2.5**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

Bagian pengembangan hipotesis ini menjelaskan mengenai hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Terdapat tiga hipotesis yang akan diuji secara langsung dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah hubungan dewan komisaris terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis kedua yaitu hubungan ukuran dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan hipotesis yang ketiga adalah hubungan ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain hipotesis tersebut, dalam penelitian ini juga akan menguji secara tidak langsung tiga hipotesis, yaitu hubungan antara ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas, dan *leverage* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. penjelasan lebih lanjut terkait dengan hipotesis dapat dilihat pada bagian di bawah ini:

### **2.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja direksi, selain itu dewan komisaris juga bertugas untuk memberikan nasehat atau petunjuk kepada direksi (Sembiring, 2005). Terkait dengan ukuran, dewan komisaris yang jumlahnya semakin banyak, maka akan meningkatkan tingkat pengawasan kinerja. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005), menyatakan bahwa semakin besar

jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, adanya monitoring akan mengakibatkan tekanan terhadap manajemen, sehingga pengungkapan informasi, termasuk informasi tanggung jawab sosial akan semakin besar pula.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian oleh Sembiring (2005) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah atau ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka proses monitoring atau pengawasan akan berjalan lebih efektif dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan diungkapkan secara luas. Penelitian serupa dilakukan oleh Sari dan Kholisoh (2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sembiring (2005) serta Sari dan Kholisoh (2009), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR**

#### **2.6.2 Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR**

Peraturan Bapepam IX.I.5 mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau

perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Di Indonesia, keberadaan komisaris independen diatur dalam Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Ketentuan dan peraturan ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Muntoro (2006), komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Dengan demikian semakin banyak jumlah ukuran dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan akan semakin objektif.

Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010), juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2002) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) dan Khan (2010), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.**

### **2.6.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Peraturan Bapepam IX.I.5 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, komite audit mempunyai tugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris. Tugas tersebut adalah untuk memastikan bahwa:

- (a) Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (b) Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
- (c) Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.

Berdasarkan tugas tersebut keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan atau monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyak ukuran komite diharapkan proses pengawasan akan dilakukan semakin baik dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas.

Penelitian terkait dengan hubungan komite audit dan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani

dkk. (2009) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Handajani dkk. (2009), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.**

## **2.7 Hubungan Variabel Kontrol dan Variabel Dependen dalam Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, rasio *leverage*, dan profitabilitas. Alasan penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel lain selain variabel yang secara fokus diteliti, yaitu karakteristik *Good Corporate Governance*. Berikut ini merupakan pengaruh atau hubungan variabel kontrol terhadap luas pengungkapan yanggung jawab sosial perusahaan:

### **2.7.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*firm size*) terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Perusahaan yang berukuran besar secara umum akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran besar memiliki kemampuan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya. Namun terlepas dari itu ada alasan lain yang menyebabkan suatu perusahaan mengungkapkan CSR adalah bahwa perusahaan untuk mendapatkan legitimasi maka perusahaan perusahaan harus melakukan aktivitas sosial agar mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.

Teori agensi mengatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya biaya keagenan yang lebih besar juga, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut perusahaan akan cenderung mengungkapkan CSR secara lebih luas. Selain itu, menurut Cowen et.al (1987) dalam Sembiring (2005), perusahaan yang besar akan selalu mendapat tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasi dan hubungan masyarakat yang lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat oleh perusahaan, sehingga hal ini akan mengakibatkan tanggung jawab sosial akan diungkapkan secara lebih luas.

Beberapa penelitian empiris telah banyak menyediakan bukti mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Hasil senada juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Handajani dkk. (2009). Sejalan dengan hasil penelitian dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) akan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

### **2.7.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan CSR**

*Leverage* keuangan (*leverage ratio*) adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membelanjai atau membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan (dari kreditur-kreditur) dengan

dana yang disediakan pemilik perusahaan. Bagi sektor perbankan yang sebagian besar operasi usahanya ditopang oleh utang dari penyimpanan misalnya tabungan dan deposito masyarakat, manfaat tersebut perlu mendapat telaah lebih lanjut. Bagi bank, utang dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Menurut Husnan (2001) dalam Sinaga (2011), hal tersebut dikarenakan keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik (melalui pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tapi bila gagal, maka pemberi kredit (dalam industri perbankan, para penyimpan) diminta untuk menanggung kerugian tersebut.

Perbankan dengan rasio *leverage* yang tinggi dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas agar kinerja perusahaan terlihat bagus. Namun demikian perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi cenderung akan melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dapat mengurangi laba. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga dengan adanya rasio *leverage* yang besar maka akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar tidak menjadi sorotan para *debholders*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* akan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### 2.7.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan CSR

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas antara lain dapat dinyatakan dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan (Wikipedia).

Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005), menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas akan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimanakah penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

#### **3.1 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menganalisis secara empiris pengaruh karakteristik-karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan bank. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

##### **3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR pada laporan keuangan tahunan bank yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)*. Kategori jumlah pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasar item pengungkapan CSR yang dipergunakan oleh Khan (2010) untuk industri yang bergerak di bidang keuangan:

- a) Kesehatan (*Health*), terdiri dari 13 item;
- b) Pendidikan (*Education*), terdiri dari 10 item;
- c) Aktivitas untuk Bencana Alam, terdiri dari 4 item;

- d) Donasi lain (*Other Donation*), terdiri dari 7 item;
- e) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), terdiri dari 13 item;
- f) Lingkungan (*Environment*), terdiri dari 6 item;
- g) Produk dan Pelanggan (*Products and Consumers*), terdiri dari 7 item;

Pengukuran pengungkapan CSR dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa luas butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. Indeks luas pengungkapan CSR (CSR<sub>i</sub>) pada perusahaan t dirumuskan sebagai berikut

$$CSR_i = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{60}$$

### **3.1.2 Variabel Bebas (Independen)**

#### **3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said, *et al.* (2009)).

### 3.1.2.2 Proporsi komisaris independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{total jumlah komisaris}} \times 100\%$$

### 3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Prastiwi (2010).

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor diluar yang tidak diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas (ROE) dan *leverage*.

#### 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Penelitian ini menggunakan proksi *total asset* dalam pengukuran *firm size*. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010).

Ukuran perusahaan (*firm size*) dirumuskan sebagai berikut :

$$Firm\ Size = Aset\ tetap + Aset\ lancar$$

### 3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : *return on equity*, *return on assets*, *earning per share*, *net profit* dan *operating ratio*. Namun dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah *return on equity* (ROE). Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010). ROE dapat diukur dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ ekuitas}$$

### 3.1.3.3 Leverage

*Leverage* adalah rasio antara jumlah total hutang dengan total modal sendiri. Rasio *leverage* mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Tingginya rasio *leverage* terhadap asset menunjukkan menunjukkan semakin banyak aktiva yang didanai hutang pada pihak luar, dan menunjukkan resiko perusahaan dalam pelunasannya, sehingga menyebabkan insentif manajemen untuk merekayasa kinerja untuk menjaga kepercayaan dari pihak eksternal. Variabel ini diukur dengan skala rasio *leverage*. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010).

Pengukuran *DER* dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$DER (Debt to Equity Ratio) = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{total ekuitas}}$$

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan yang memiliki *annual report* tahun 2008-2011 yang terdapat di bursa efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau dapat diakses dari *website* masing-masing perusahaan.
2. Mengungkapkan (*disclosure*) informasi tentang tanggung jawab sosial.
3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari:

1. Laporan tahunan perusahaan tahun 2008-2011 yang dipublikasikan untuk umum yang diperoleh dari situs web resmi masing-masing perusahaan.
2. Jurnal, makalah, penelitian, buku, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data-data keuangan dalam laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

##### **3.5.1.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah Ghozali (2006):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### 3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ .

### 3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan menggunakan *scatterplot*, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Geljser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006). Jika variabel independen signifikan secara statistik

mempengaruhi variabel dependen, yang dalam hal ini adalah absolut residual, maka ada indikasi terjadinya Heteroskedastisitas.

#### **3.5.1.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk mendeteksi autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji *Durbin Watson* (D-W test). Uji *Durbin Watson* banyak dipergunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai *Durbin Watson* diantara nilai  $du$  dan  $4-du$  ( $du < dw < 4-du$ ).

#### **3.5.2 Analisis Regresi Berganda**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen (ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit) dengan variabel dependen (pengungkapan tanggung jawab sosial). Alasan lain penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda adalah karena penelitian ini menggunakan data parametrik, baik variabel dependennya maupun variabel independennya. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat

mendukung hipotesis yang telah dilakukan. Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik implementasi GCG perusahaan yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas perusahaan, dan *leverage*.
2. Menghitung indeks CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dengan menandingkan dengan standar yang digunakan.
3. Menghitung model regresi.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan software SPSS Versi 16.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CSR_i = \alpha + \beta_1UDK + \beta_2DKI + \beta_3KA + \beta_4Size - \beta_5Lev - \beta_6Prof + e$$

Keterangan :

CSR<sub>i</sub> : indeks pengungkapan CSR (Dependen)

$\alpha$  : *intercept*

UDK : ukuran dewan komisaris

DKI : proporsi komisaris independen

KA : ukuran komite audit

Size : ukuran perusahaan (*kontrol*)

Prof : profitabilitas (*kontrol*)

Lev : *leverage* (*kontrol*)

$e$  : *error term*

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan uji statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik. Menurut Ghozali (2006) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (*F test*), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (*t test*).

#### 3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (*F test*)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi  $f < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi  $f > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

### 3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena  $R^2$  mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted*  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted*  $R^2$  semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

### 3.5.3.3 Uji Parsial (*t-test*)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. . Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Bila nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen.